



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : STAF AHLI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MOHAMMAD NIZAM**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**
3. NHK : **781168**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 4.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1498 m<sup>2</sup>/1000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 1.703 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 361.46 m<sup>2</sup>/361.46 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 2000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 485 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 4000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SIGI, WARISAN Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 3600 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SIGI, WARISAN Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 177.000.000**

1. MOBIL, X TRAIL NISSAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, AGYA TOYOTA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 83.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.560.550.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.560.550.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.